

Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung Silalahi Di Kabupaten Dairi

¹Harmila Morika Tarigan, ²Husni Thamrin

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi : harmilatarigan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Silalahi, Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi (komunikasi), karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik dan disposisi implementor. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Tao Silalahi khususnya objek wisata Dermaga Apung sudah berjalan dengan baik terkhusus variabel karakteristik pelaksana. Komunikasi antar instansi pelaksana sudah baik namun koordinasinya belum maksimal karena masalah keterbatasan anggaran dan masalah sinkronisasi program antarinstitusi yang dibatasi oleh tugas pokok instansi di wilayah lain dan lebih berfokus pada program yang ada di renstranya masing-masing. Terkait dengan sikap pelaksana masih kurang tanggap dalam melaksanakan tugasnya serta kondisi sosial, ekonomi dan politik masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan pengembangan pariwisata.

Kata kunci: Implementasi, Pengembangan Objek Wisata, Dermaga Apung Silalahi.

Abstract

The purpose of the research conducted was to find out how the implementation of local government policies in developing tourism in Silalahi Village, Silahisabung District, Dairi Regency. The type of research in this research is qualitative research with a descriptive approach and using Van Meter and Van Horn theory covering policy standards and targets, resources, inter-organizational relations (communication), characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions and the disposition of the implementer. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation. The results of the study show that the implementation of tourism development policies in the Tao Silalahi Region, especially the Floating Pier tourist attraction, has been going well, especially the variable implementing characteristics. Communication between implementing agencies is good, but coordination is not optimal due to budget constraints and inter-agency program synchronization problems which are limited by the main tasks of agencies in other regions and focus more on programs in their respective strategic plans. Related to the attitude of executors who are still not responsive in carrying out their duties and social, economic and political conditions are still not optimal in supporting the implementation of tourism development.coordination.

Keyword: Implementation, Tourism Object Development, Silalahi Floating Pier

1. PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu andalan sektor pembangunan di Indonesia pada saat ini. Sebagai negara dengan ribuan pulau yang beraneka keindahan alamnya dan penduduknya Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar tentunya dapat digunakan sebagai pemikat dalam bidang kepariwisataan (Labalo, 2011 : 233). Daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Indonesia adalah karena keindahan alam dan kekayaan seni

budaya, potensi ini sangat menarik untuk dikembangkan dan pengembangan pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan (*Agent of Development*). Dengan adanya kebijakan yang strategis tentu akan membuat pariwisata sebagai sektor komiditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara kedua setelah minyak bumi dan gas alam.

Kebijakan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan potensi pariwisata dapat berupa pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang berlaku sejak tahun 1999. Kebijakan ini sebenarnya mempunyai konsep dasar berdasarkan potensi, preferensi, dan aspirasi daerah secara demokratis dengan mengikutsertakan peran masyarakat setempat. Salah satu potensi tersebut ialah pengembangan dan pelestarian sumber daya alam melalui ekowisata yang merupakan satu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi konservasi, dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem yang masih alami, bahkan dengan ekowisata pelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya karena desakan dan tuntutan dari para *eco-traveller*, (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata).

Pengembangan pariwisata pastinya melibatkan pelaku dalam kegiatan wisata seperti kalangan pemerintah, industri pariwisata maupun masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata sangat diperlukan karena semakin banyak masyarakat yang membutuhkan ruang untuk beristirahat dari kesibukan sehari-hari atau hanya sekedar menikmati keindahan suatu objek wisata. Banyak negara di dunia ini berusaha menggali potensi wisata yang ada di negaranya untuk dikembangkan dan dipromosikan ke negara lain. Pariwisata juga sebagai sarana pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang cepat berkembang dan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling penting.

Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha serta mampu menghadapi perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan pariwisata ditingkatkan dengan pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia dan potensi wisata nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa dan memperluas lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha, mendorong pembangunan daerah serta memperkenalkan kekayaan alam, nilai budaya, keindahan panorama alam Indonesia.

Kepariwisataan bertujuan untuk menggalakkan perekonomian Nasional dan Daerah. Krisis moneter telah melanda Indonesia pada tahun-tahun lalu, kegiatan kepariwisataan memiliki potensi besar dalam peningkatan perekonomian Nasional yang salah satu pendorongnya ialah globalisasi di berbagai sektor. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan kepariwisataan akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Prospek kepariwisataan yang semakin cerah dan posisi strategis yang diemban dalam kerangka pembangunan nasional, memberikan keharusan dan dorongan akan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kinerja kepariwisataan nasional, maupun peningkatan daya saing yang semakin kuat agar mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin kuat dan besar, serta pergerakan wisatawan yang semakin merata dan minat investasi yang semakin tinggi di Indonesia. Dengan demikian nilai manfaat ekonomi yang didorong oleh sektor pariwisata akan berkontribusi signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (*Laporan Kinerja Kemenpar_2021 diakses melalui www.kemenpar.go.id, pada 19 september 2020, pukul 04:15*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa Badan Pelaksana memiliki tugas yaitu melakukan kordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Danau Toba.

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Perwilayahan Pembangunan DPN adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPN, dan KSPN. (PP RI No. 50 Tahun 2011, diakses melalui www.hukumonline.com, pada 06 Oktober 2020, pukul 15:23).

Danau Toba sebagai salah satu dari destinasi pariwisata nasional telah masuk kedalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang terbagi kedalam tujuh kabupaten, yaitu : Kab. Simalungun, Kab. Toba Samosir (Tobasa), Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, dan Kab. Samosir. Kabupaten Dairi merupakan salah satu kabupaten yang menjadi wilayah yang terdapat di lingkaran Danau Toba, dan merupakan salah satu sasaran pembangunan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Sidikalang, Berampu, Sitinginjo, Parbuluan, Sumbul, Silima Punga-Punga, Lae Parira, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Tigalingga, Gunung Sitember, Pegagan Hilir, Tanah Pinem dan Kecamatan Silahisabungan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi 284.304,00 jiwa, terdiri dari 139.401 penduduk laki-laki (49,95%) dan 139.689 penduduk perempuan (50,05%), dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 144,77 jiwa/km², dengan luas wilayah 1.927,8 km² (www.dairikab.go.id/demografi).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah maka pemerintah mengembangkan pariwisata di kecamatan Silahisabungan dengan menggunakan anggaran dari APBD sehingga proses pengembangan pariwisata di daerah ini masih dalam tahap pembangunan yang masih sederhana seperti pembuatan jalan setapak menuju objek wisata, pembuatan plank/nama jalan untuk mempermudah wisatawan menuju daerah tersebut. Objek dan daya tarik wisata adalah suatu bentukan atau aktifitas dan fasilitas yang berhubungan yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Bila daya tarik tersebut belum dikembangkan dan masih merupakan sumber daya potensial maka ia belum dapat disebut sebagai daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu, seperti penyediaan aksesibilitas atau fasilitas.

Sumber daya alam yang ada di daerah ini memiliki potensi yang dapat membantu menaikkan Pendapatan Asli Daerah jika diolah dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Oleh karena itu, potensi objek wisata yang ada di kecamatan Silahisabungan belum banyak yang mengetahui dan daya tarik wisatawan terhadap pariwisata di daerah ini pun masih kurang. Salah satu objek wisata yang sedang dikelola adalah Dermaga Wisata Silalahi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan sudah dibangun sejak natal dan tahun baru tahun 2020. Dermaga wisata ini sudah ada sejak setahun yang lalu dan akan di prioritaskan oleh pemerintah dalam proses pembangunannya.

Adapun hambatan yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan yang berada di daerah ini, yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola pariwisata sehingga menghambat proses kegiatan kepariwisataan. Daerah kabupaten Dairi memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Namun kurang adanya keterkaitan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dimana sebagai perantara yang ikut serta belum memperhatikan pengembangan potensial pariwisata dari aspek anggaran yang hingga saat ini belum cukup membantu pengelolaan sarana dan prasarana. Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan dan upaya pemerintah dalam mempersiapkan tiap-tiap komponen pengembangan kawasan objek wisata Tao Silalahi di Kecamatan Silahisabungan serta penerapan pengelolaan yang ada saat ini dalam upaya mempersiapkan kawasan wisata Silahisabungan

sebagai destinasi wisata unggulan dan menjadi kawasan strategis pariwisata nasional di Kabupaten Dairi terutama dalam pengembangan kawasan objek wisata Tao silalahi yang masih butuh perhatian lebih dari pemerintah dalam pembangunan sarana prasaarana.

2. METODE

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bungin (2007:68), penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, atau pun fenomena tertentu.

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi dan di Dermaga Apung Silalahi. Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi dan di Dermaga Apung Silalahi.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik : wawancara mendalam (*indepth interview*) dilakukan dengan cara *purposive* (bertujuan) dengan para informan, observasi lapangan melalui kajian pustaka, sumber tertulis seperti buku, artikel, dokumen dan lain-lain yang masih ada relevansinya dengan bidang kaji penelitian, dokumentasi berupa foto-foto peneliti dalam kegiatan penelitian saat di lapangan. Teknik analisa data dengan Data *Condensation* (Kondensasi Data), Data *Display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/Verification*.

Informan dalam penelitian merupakan seorang individu atau pelaku yang benar-benar paham dan menguasai. Serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Dalam hal ini samping digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud dari kedua dari adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana Implementasi pengembangan program ekowisata di desa Silalahi Kecamatan Silasabungan Kabupaten Dairi.

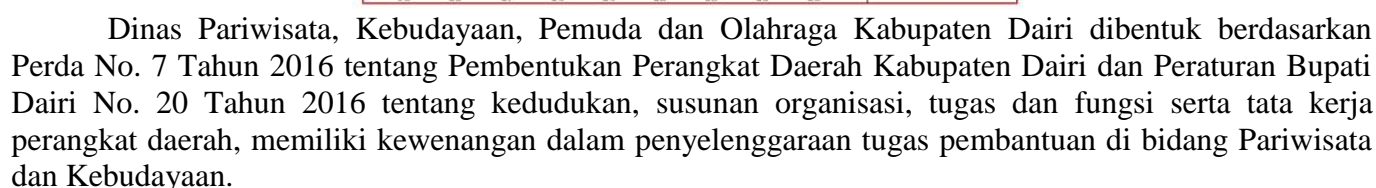
Tabel Matrik Informan Penelitian

NO	INFORMAN PENELITIAN	INFORMASI YANG DIBUTUHKAN	TEKNIK YANG DIGUNAKAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dairi	1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan, 2. sumber daya, 3. komunikasi antar badan pelaksana 4. karakteristik badan pelaksana, 5. lingkungan sosial,	- Wawancara	1

			ekonomi dan politik, dan 6. sikap pelaksana		
2.	Pegawai Pariwisata Kabupaten Dairi	Dinas	1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan, 2. sumber daya, 3. komunikasi antar badan pelaksana 4. karakteristik badan pelaksana, 5. lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan 6. sikap pelaksana	- Wawancara.	3
3.	Masyarakat		1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan, 2. sumber daya, 3. komunikasi antar badan pelaksana 4. karakteristik badan pelaksana, 5. lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan 6. sikap pelaksana	Wawancara	10
4.	Wisatawan		1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan, 2. sumber daya, 3. komunikasi antar badan pelaksana 4. karakteristik badan pelaksana, 5. lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dan 6. sikap pelaksana.	Wawancara	6
			TOTAL		20

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Dairi merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatra Utara dengan luas wilayah 192.780 hektare, yaitu sekitar 2,69% dari luas Provinsi Sumatra Utara. Pada umumnya Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 s.d. 1.250 m diatas permukaan laut, dengan 15 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Dairi akhir tahun 2020 adalah sebanyak 317.751 jiwa. Secara geografis Kabupaten Dairi terletak pada 2015'00" - 3000'00" Lintang utara dan 98000" - 98030" Bujur timur. Ibukota dari Kabupaten Dairi adalah Kecamatan Sidikalang.



Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi merupakan unsur pelaksana bidang Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Olahraga yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas otonomi daerah di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.

1. Perumusan Kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. Pelaksanaan Kebijakan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga;
4. Pelaksanaan administrasi bidang pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dairi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Dairi No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi. Peraturan Bupati Dairi No. 20 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Dairi merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keberhasilan dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan dalam pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi dapat diukur dari ukuran dan tujuan kebijakan yang ada. Implementasi dari suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika ukuran dan tujuannya memang sesuai dengan sosio-kultur yang ada. Sebaliknya, implementasi dari suatu kebijakan bisa saja gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya paham akan ukuran dan tujuan dari kebijakan yang ditetapkan.

Standar atau ukuran suatu kebijakan merupakan acuan yang sangat penting menentukan berhasil atau gagalnya diimplementasikannya suatu kebijakan. Dalam hal ini tentu saja para pelaksana (*implementor*) diharapkan paham dan sadar akan standar atau ukuran kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi yang nantinya akan diimplemntasikan sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang membuat para pelaksana (*implementor*) kesulitan dalam mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada dua faktor yang menyebabkan para pelaksanaan kesulitan dalam mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakan yaitu :

1. Disebabkan oleh cakupan kebijakan yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks.
2. Disebabkan oleh tidak jelasnya (kabur) dan adanya kontadiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan.

Berdasarkan hasil diatas maka pemahaman tentang suatu ukuran dan tujuan kebijakan sangatlah penting. Sikap dan arah disposisi para pelaksana terhadap ukuran dan tujuan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan juga menjadi penentu berhasilnya kebijakan itu sendiri, hal ini dikarekan para pelaksana bisa saja menolak atau bahkan melaksakannya dengan ketidakpahaman apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Ukuran Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung Silalahi. Standar dan ukuran suatu kebijakan merupakan acuan yang sangat penting menentukan berhasil atau gagalnya diimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini tentu saja para pelaksana (*implementor*) diharapkan paham dan sadar akan standar dan ukuran kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi yang nantinya akan diimplementasikan sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pedoman atau dasar kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi adalah Peraturan Presiden no. 49 tahun 2016 tentang pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Kemudian, berdasarkan hasil observasi, mengenai ukuran atau pedoman dari kebijakan pengembangan Dermaga Apung Silalahi yaitu berdasarkan Peraturan Presiden no.49 tahun 2016 tentang pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), peneliti mengamati secara langsung perihal Peraturan Presiden tersebut dalam bentuk dokumen dinas (Observasi : 26 februari 2021). Selanjutnya, berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti meperoleh dokumen dinas berupa Peraturan Presiden tentang pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). (Dokumentasi: 26 Februari 2021).

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan informasi-informasi dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa para pelaksana yang juga menjadi informan paham bahwa apa yang menjadi standar ukuran atau pedoman dari kebijakan pengembangan Dermaga Wisata Silalahi Kabupaten Dairi melalui Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2016.

Tujuan Kebijakan Pengembangan Dermaga Wisata Silalahi

Dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan dermaga wisata silalahi tidak cukup hanya paham terhadap standart ukuran atau pedoman dari kebijakan tersebut, tetapi kepaahaman terhadap pelaksana pada tujuan kebijakan tersebutjuga menjadi salah satu faktor penentu berjalannya kebijakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian untuk mencapai keberhasilan suatu kebijakan diperlukam cara agar standar dan sasaran atau tujuan kebijakan dapat terealisasikan.

Berdasarkan hasil wawncara dengan beberapa informan diatas, peneliti mengemukakan bahwa para pelaksana paham dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Para pelaksana mengatakan bahwa tujuannya yaitu menjaga dan membangun potensi wisata, meningkatkan daya tarik wisata Dermaga Silalahi, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat setempat. Kemudian, selain itu masyarakat dan wisatawan memberikan tanggapan positif dan banyak sekali merasakan manfaat baik dari segi perkembangan lingkungan dan kemajuan ekonomi. Dengan kata lain tujuan dari kebijakan ini terealisasi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum sepenuhnya sempurna. Tetapi sudah ada perkembangan dari objek wisata yang telah dibangun.

Berdasarkan hasil observasi mengenai tujuan kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi yaitu, dimana para pelaksana memahami tujuan kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi yaitu untuk menjaga dan membangun potensi wisata, meningkatkan daya tarik wisata, dan dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Ada pun berdasarkan hasil pengamatan di Dermaga Wisata Silalahi, banyak fasilitas atau sarana prasarana penunjang wisata yang sudah dibangun dan ada juga yang sedang dikembangkan sekaligus melakukan penataan ruang pariwisata. (Observasi: 27 Desember 2020). Berdasarkan hasil dokumentasi yang peneliti dapat dilapangan yaitu peneliti memperoleh data mengenai statistik data kunjungan wisatawan ke Dermaga Silalahi dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan dalam bentuk dokumen dinas. (Dokumentasi: 6 Januari 2021)

Tabel Data kunjungan wisatawan Kecamatan Silahisabungan, Kabupaten Dairi.

TAHUN	Wisatawan Asing	Wisatawan Nusantara	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	81	35.011	35.092
2018	90	41.420	41.510
2019	106	45.200	45.305
2020	31	17.300	17.331

Sumber: Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan informasi-informasi dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dikemukakan bahwa para pelaksana paham dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi ini sudah berjalan dengan baik, akan tetapi karena adanya virus Covid_19 terjadi saat ini menyebabkan angka wisatawan semakin menurun. Hal ini terlihat dari angka kunjungan wisatawan yang telah menurun.

Dalam suatu kebijakan mungkin saja tujuan yang ditetapkan sudah jelas dan sesuai realita, tetapi bukan hanya indikator tersebut yang terkait dengan pengimplementasian suatu kebijakan. Indikator sumber daya juga mempunyai keterkaitan yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus di perhatikan dalam menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi di Kabupaten Dairi.

Ukuran Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Apung Silalahi

Standar atau ukuran suatu kebijakan merupakan acuan yang sangat penting menentukan berhasil atau gagalnya diimplementasikannya suatu kebijakan. Dalam hal ini tentu saja para pelaksana (*implementor*) diharapkan paham dan sadar akan standar atau ukuran kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Apung Silalahi yang nantinya akan diimplementasikan sehingga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Namun demikian, ada beberapa faktor yang membuat para pelaksana (*implementor*) kesulitan dalam mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada dua faktor yang menyebabkan para pelaksanaan kesulitan dalam mengidentifikasi ukuran dan tujuan kebijakan yaitu :

1. Disebabkan oleh cakupan kebijakan yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks.
2. Disebabkan oleh tidak jelasnya (kabur) dan adanya kontadiksi dalam pernyataan ukuran dan tujuan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusianya (pegawai). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, kegagalan yang biasanya terjadi dalam pelaksanaan kebijakan salah satu disebabkan oleh sumber daya manusia yang tidak memadai dan tidak kompeten di bidangnya dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti mengemukakan bahwa kemampuan para pegawai sebagai pelaksana sangat di manfaatkan sesuai keahlian yang dimiliki masing-masing pegawai. Untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan para pegawai pelaksana, mereka diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana pengembangan-pengembangan pariwisata baik itu dari pemerintah daerah ataupun pusat. Selain itu hasil wawancara diatas menunjukkan jumlah pegawai yang bertugas khusus pengembangan pariwisata sebenarnya masih kurang yaitu berjumlah 5 orang saja. Namun diupayakan semaksimal mungkin untuk menjalankan atau melaksanakan kebijakan pengembangan Dermaga Wisata Silalahi sebagai tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya, mengenai kemampuan para pelaksana kebijakan berdampak pada kinerja mereka yang tetap mengawasi berjalannya proses pembangunan dan tetap melakukan sosialisasi dengan masyarakat.

Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial menjadi penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan. Bahkan terkadang untuk menjalankan kebijakan memerlukan kebutuhan dana yang besar untuk menghasilkan dan melaksanakan kebijakan yang berkualitas terkait pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi.

Dengan demikian pendanaan yang terukur dari pemerintah tentu dana tersebut dimanfaatkan dengan baik dan lebih terarah pembangunannya. Terkait itu, peneliti mencari informasi dari Wisatawan terkait fasilitas yang ada di Dermaga Wisata Silalahi

Karakteristik

Dalam implementasi kebijakan agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri pegawai yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

Selanjutnya, adapapun hasil observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung yaitu peneliti ikut dan melihat secara langsung hasil dari pembangunan dermaga wisata yang sudah dibangun oleh pemerintah pada akhir tahun 2019 lalu dan sudah berjalan selama setahun. Dan juga peneliti juga melihat aksi mereka pada saat pembangunan tempat duduk dan toilet sekitar dermaga yang sudah selesai dan sudah bisa dinikmati oleh wisatawan. Hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti juga ialah melakukan pengamatan langsung mengenai dokumen RIPARKAB yang menjadi standar operasional prosedur dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dalam bentuk program pembangunan dan kegiatan di sekitaran Dermaga wisata Silalahi. (Observasi: 26 Desember 2020).

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi di Kabupaten Dairi. Implementasi yang berjalan efektif terjadi apabila para pelaksana paham dan mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab. Kepahaman akan ukuran dan tujuan yang hendak dicapai kemudian dikerjakan dengan komunikasi yang baik akan menghasilkan proses pelaksanaan implementasi kebijakan pengembangan lebih maksimal. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses penstransferan berita kebawah didalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan ke komunikator lain sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja

maupun tidak. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan mempunyai keterkaitan yang penting terhadap berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Sikap Pelaksana (Disposisi)

Salah satu faktor yang juga menunjang berhasilnya implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana (disposisi). Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, mau bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari tentang standar dan tujuan kebijakan tersebut. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan.

Ukuran

Standar atau ukuran dari pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi didasarkan pada Peraturan Bupati Dairi No. 14 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden no. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba yang tentang pengembangan pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional.

Tujuan kebijakan ini yaitu :

1. Untuk menjaga atau melestarikan dan membangun potensi wisata Dermaga Silalahi menjadi lebih baik dan lebih bagus dari yang sebelumnya.
2. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, sehingga Dermaga Wisata Silalahi bisa bersaing dengan destinasi-destinasi wisata lain, baik didalam maupun diluar negeri.
3. Memberikan dampak ekonomi yang lebih baik kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi masih belum terlaksana dengan baik karena sulitnya membangun komunikasi dengan masyarakat setempat dalam hal kerjasama memelihara dan mendukung proses pembangunan fasilitas dan pelaksanaan program kegiatan, namun sejauh ini upaya dalam implementasi kebijakan dan proses pengembangannya masih memiliki kendala seperti sumber daya manusia yang belum memadai dan hasil koordinasi yang belum terlaksana dengan baik terhadap beberapa dinas. Standar atau ukuran dari pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi didasarkan pada Peraturan Bupati Dairi No. 14 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden no. 49 tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Danau Toba yang tentang pengembangan pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan objek wisata Dermaga Silalahi antara lain sebagai berikut :

Sumber Daya, Karakteristik Antar Badan Pelaksana, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, Dan Politik, Sikap Pelaksana (Disposisi).

5. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Dermaga Silalahi, peneliti akan memberikan beberapa masukan dan saran sesuai variabel yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berkaitan dengan ukuran dan tujuan kebijakan diharapkan agar para pelaksana tetap senantiasa mengikuti apa yang sudah menjadi ukuran atau standar kebijakannya dan lebih giat dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dan juga untuk meningkatkan pembangunan pariwisata di Kawasan Tao Silalahi pemerintah juga seharusnya menerbitkan peraturan daerah untuk memprioritaskan pengembangan pariwisata yang ada di kawasan Tao Silalahi.

2. Sumber Daya

Berkaitan dengan sumber daya manusianya, saya harap para pelaksana memberikan upaya yang optimal dalam implementasi kebijakan pengembangan ini. Para pegawai terus ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan – pelatihan agar lebih kreatif dan terampil. Dan juga untuk menunjang cara kerja yang efektif saya menyarankan agar jumlah pegawainya ditambahkan melalui perekrutan pegawai negeri sipil sesuai kemampuan dan hasil belajar bidang pariwisata. Pemberdayaan masyarakat juga sangat diperlukan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Tao Silalahi ini, yaitu dengan diadakannya pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat setempat. Seperti dalam bidang akomodasi, transportasi, dan souvenir.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Mengenai karakter badan pelaksana, saran saya agar menjalankan setiap kegiatan tepat pada waktu dan prosedur yang ditentukan, lebih tegas dan kuat serta melakukan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan.

4. Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Saya mengharapkan agar para pelaksana tetap komitmen dan berupaya dalam membangun hubungan dan menjalin koordinasi dengan semua pihak yang terlibat. Gunakan cara yang lebih komunikatif lagi kepada pihak – pihak yang terlibat terlebih kepada masyarakat agar lebih paham dan percaya pada tindakan pemerintah dan juga kepada dinas lain, misalnya melalui koordinasi lanjutan kepada kepala daerah jika mendapat respon kurang baik dari dinas lainnya.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik, hendaknya pemerintah mulai lebih intens dan terbuka kepada masyarakat, karena semakin cepat pengembangan ini terealisasi semakin memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

6. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Saran saya para pelaksana tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, belajar dan mampu memberikan inovasi – inovasi baru untuk perkembangan objek wisata ini menjadi lebih baik dan semakin dikenal oleh banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Rineka Cipta.
- [2]. Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [3]. Amirin, Tatang M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- [4]. Bogdan, Biklen, 1982 *Pengantar Studi Penelitian*, Bandung: PT ALFABETA.
- [5]. Agustino, Leo, 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta

- [6]. Bungin, Burhan H.M, 2007; Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan. Publik, dan Ilmu social, Jakarta
- [7]. Dwiyanto, Indiahono, 2009, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy
- [8]. H, Solichin Abdul W. 2008. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Malang: UMM Press.
- [9]. Erawan, I Nyoman. 1989. Pariwisata Dan Pembangunan Ekonomi (Bali Sebagai Kasus). Denpasar. PT Upada Sastra.
- [10]. Hadinoto, Kusudianto. 1996. Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Jakarta. Universitas Indonesia Pers.
- [11]. Kotler, Philip. 1999. Pemasaran Perhotelan Dan Kepariwisataaan. New Jersey. Prentice Hall, Iac-.
- [12]. Marpaung, Happy. 2000. Pengetahuan Kepariwisataaan. Bandung. Alfabeta.
- [13]. Sugiantono, Rony. 2000. Pariwisata Antara Obsesi Dan Realita. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa
- [14]. Vellas Francois dan Lionel Becherel. 2008. Pemasaran Pariwisata Internasional. Jakarta Pusat.
- [15]. Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI bekerja sama dengan Pusat Pembukuan.
- [16]. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- [17]. PP RI No. 50 Tahun 2011 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025.
- [18]. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 07 tahun 2007 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Dairi tahun 2007 No. 7 tambahkan lembaran negara no. 190)